**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap  
Keandalan Pelaporan Keuangan**

**Di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung**

Desy Mulyasari

NPM : 148020108

Universitas Pasundan

**Abstrak**

Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Dalam penelitian ini, variabel independen (X) adalah sistem pengendalian internal yang diukur dengan variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5). Sedangkan variabel dependen (Y) adalah keandalan pelaporan keuangan.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dibagikan kepada staf di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan oleh penulis, melalui media perantara berupa bukti, catatan, dokumen dikumpulkan dan peraturan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan keandalan pelaporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi yang didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat.

Sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap keandalan pelaporan keuangan sebesar 84%. Secara parsial lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

**Kata Kunci :** *Sistem Pengendalian Intern, Keandalan Pelaporan Keuangan.*

**JURNAL**

1. **Pendahuluan**

Kelemahan dalam sistem keuangan di Indonesia di era orde baru yaitu kelemahan dalam desian dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyimpanan keuangan negara yang semrawut, tidak adanya informasi tentang aset dan hutang dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai. (Nasution (2007). Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Nasution (2007).

Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran Sistem Pengendalian Intern adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem Pengendalian Intern baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai sistem pengendalian intern pemerintah yang bersangkutan, seperti diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.”

Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan bagi satuan kerja digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. (Nasution (2007).

Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata pada Tahun 2014 yaitu Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer). Pendapat Tidak Wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat apabila: 1) Ada pembatasan yang sangat material terhadap lingkup audit, 2) Auditor tidak independen terhadap klien. Terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. (Indra, 2011:196).

BPK menemukan adanya sistem pengendalian intern atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum memadai, hal ini terjadi karena bendahara penerimaan tidak tertib dalam mengelola dan mengawasi penerimaan. Hal ini disebabkan bendahara penerimaan melakukan pencatatan ke dalam Buku Kas Umum setelah uang disetorkan ke negara dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sehingga dimungkinkan masih ada penerimaan kas (tunai/transfer) yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum tercatat dalam BKU Bendahara Penerimaan.

Menurut BPK RI Tahun 2014, penerimaan sewa atas pemanfaatan aset STP Bandung oleh Yayasan Kopensi setiap tahunnya tidak dapat diyakini keterjadiannya karena tidak didukung oleh dokumen yang sebenarnya. Pihak STP Bandung maupun pihak Yayasan Kopensi selama ini tidak pernah melakukan pencatatan jumlah pemakaian ruangan (per jam/hari) yang sebenarnya setiap bulan. Selain itu, ditemukan adanya penggolongan kualitas piutang yang dikategorikan piutang lancar padahal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan piutang dikategorikan berdasarkan jangka waktu tertagihnya piutang tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 50 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh penerimaannya pada akhir hari kerja melalui Bank Umum dan badan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”;

b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara pasal 7 ayat (1) poin (i) menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan keuangan negara dengan adanya pengelolaan penerimaan yang tidak tertib, kekurangan penerimaan negara atas PNBP yang belum disetor, denda keterlambatan dan pajak yang belum disetor, realisasi PNBP yang digunakan langsung dianggap tidak wajar dan berisiko terjadinya penyalahgunaan keuangan negara serta penyajian saldo piutang bukan pajak belum memadai/akurat. Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait dalam pengelolaan PNBP dan lemahnya pengawasan dari para pengelola Barang Milik Negara serta kurangnya pemahaman Pengelola Administrasi Kemahasiswaan terhadap ketentuan yang berlaku.(BPK RI 2014)

Adanya permasalahan mengenai ketidaktertiban dan jumlah realisasi PNBP serta saldo piutang negara bukan pajak (PNBP) yang tidak wajar serta tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dalam Laporan Keuangan menunjukkan belum tercapainya tujuan sistem pengendalian intern pemerintah yaitu keandalan pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

1. **Tinjauan Pustaka**
   1. **Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kumpulan teori dan pengertian yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kajian yang diteliti. Kajian pustaka dalam penelitian ini terdiri atas :

• Grand teory berupa pengertian manajemen.

• Medium teory berupa pengertian manajemen keuangan.

• Applied teory berupa pengertian sistem pengendalian intern pemerintah dan keandalan laporan keuangan.

* + 1. **Sistem Pengendalian Intern**
       1. **Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Perlunya pengendalian intern di seluruh kegiatan pemerintahan menjadikan adanya sebuah sistem pengendalian intern yang dibuat menjadi Peraturan Pemerintah yaitu Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Jadi, sistem pengendalian intern merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh melalui tindakan dan kegiatan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas tujuan sistem pengendalian intern yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

* + - 1. **Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Intern memiliki unsur-unsur di dalamnya yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Unsur-unsur tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. **Lingkungan Pengendalian**

Menurut Indra (2011:11), lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Menurut setjen, deptan.go.id, lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:

“Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a.Penegakan integritas dan nilai etika.

b.Komitmen terhadap kompetensi.

c.Kepemimpinan yang kondusif.

d.Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

e.Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

f.Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

g.Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

h.Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.”

1. **Penilaian Resiko**

Menurut setjen, deptan.go.id, penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, yang terdiri atas:

a.Identifikasi risiko.

b.Analisis risiko.

Menurut setjen, deptan.go.id, identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

1. **Kegiatan Pengendalian**

Menurut setjen Menurut Indra (2011:12) aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Menurut setjen, deptan.go.id, kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:

“Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, yang terdiri atas:

a.Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

b.Pembinaan sumber daya manusia.

c.Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

d.Pengendalian fisik atas aset.

e.Pemisahan fungsi.

f.Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, dilakukan dengan cara menetapkan ukuran dan indikator kinerja serta mereviu secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

g.Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.

h.Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dalam kejadian.

i.Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

j.Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

k.Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.”

1. **Informasi dan Komunikasi**

Menurut setjen, deptan.go.id, informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 :

“Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

a.Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

b.Mengelola, mengembangkan, memperbarui sistem informasi secara terus menerus.”

1. **Pemantauan**

Menurut setjen, deptan.go.id, pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 :

“Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan melalui:

a. Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

b. Evaluasi terpisah, dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak ekstern pemerintah.

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.”

**2.1.2 Keandalan Pelaporan Keuangan**

Pengelolaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

“Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Beberapa bentuk keandalan laporan keuangan dari penyajian jujur antara lain :

a. Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan.

b. Dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik pengujian sesuai dengan makna transaksi serta peristiwa yang terjadi.

Informasi keuangan biasanya tidak luput dari risiko penyajian yang kurang jujur dari apa yang sebenarnya digambarkan. Hal tersebut bukan di sebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

(b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

Beberapa bentuk keandalan laporan keuangan dari netralisasi antara lain :

a. Informasi yang disajikan diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

b. Informasi yang disajikan tidak mengandung unsur untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain.”

Jadi keandalan pelaporan keuangan merupakan laporan keuangan yang disajikan dengan informasi yang disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral.:

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Menurut Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan kerangka hubungan antara variabel dependen dengan variabel indipenden. Sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel independen mempengaruhi variabel dependen yaitu keandalan pelaporan keuangan.

**2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan sumber yang digunakan dalam setiap pengambilan keputusan, terutama di dalam lingkungan pemerintah laporan keuangan digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya, oleh karena itu laporan keuangan harus dapat diandalkan.

Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. (PP No 8 Tahun 2006)

Dalam rangka meningkatkan keandalan peleporan keuangan, maka setiap lingkungan pemerintah harus melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah yang didalamya terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa salah satu tujuan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya keandalan pelaporan keuangan. Mahmudi (2007:7) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

**2.2.1.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan**

Lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang mempengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi atmosfir individu organisasi di dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian yang menjadi bagiannya. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Apabila lingkungan pengendalian menunjukan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat (Tony, 2008:5)

**2.2.1.2 Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan**

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tersajinya laporan keuangan yang dapat diandalkan. Penilaian resiko terkait dengan aktivitas bagaimana entitas mengidentifikasikan dan mengelola resiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam penyajian laporan keaungan yang andal. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Menurut Anindita (2006:229), penilaian resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko dari suatu pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disesuaikan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.

**2.2.1.3 Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan pengendalian meliputi organisasi pusat pengeolahan data, prosedur dan standar perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data yang mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa semua transaksi keuangan yang telah diproses sekali saja secara lengkap, menjamin bahwa data transaksi keuangan lengkap dan teliti, menjamin bahwa hasil pengolahan data dan transaksi keuangan benar dan sesuai keadaan atau dapat diandalkan, menjamin bahwa hasil pengolahan data keuangan dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa aplikasi keuangan dapat terus menerus berfungsi. (Anindita 2006:230)

**2.2.1.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan**

Informasi dan komunikasi merupakan data yang telah diolah menjadi informasi dan disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyajian pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem akuntansi adalah salah satu bentuk informasi yang paling penting karena diciptakan untuk mengidentifikasikan, menganalisa dan melaporkan transaksi keuagan serta menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan, sedangkan komunikasi yang terjalin dengan baik antar personel entitas pemerintah dapat memudahkan terjadinya perputaran informasi, sehingga dapat menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan. (Anindita, 2006:230)

**2.2.1.5 Pengaruh Pemantauan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. (PP No 60 Tahun 2008).

Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan secara efektif mempengaruhi pengelolaan keuangan yang ditetapkan berjalan dengan baik, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan penyajian pelaporan keuangan, pemeberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakuakan dapat menjadi jaminan yang cukup tidak hanya untuk keandalan pelaporan keuangan, namun memberikan pula jaminan yang cukup bagi sasaran kinerja yang ingin dicapai, dilaksanakannya pengawasan intern yang efektif dan kontinyu pada setiap kegiatan dapat menjamin kinerja pemerintah daerah tercapai dengan baik. (Wawan, 2009:578)

Berdasarkan uraian tersebut, skema pemikiran dapat dilihat dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

* 1. **Hipotesis Penelitian**

1. Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern barang milik negara yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan Informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap keandalan pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
2. Terdapat pengaruh lingkungan pengendalian terhadap keandalan pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
3. Terdapat pengaruh penilaian risiko terhadap keandalan pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
4. Terdapat pengaruh kegiatan pengendalian terhadap keandalan pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
5. Terdapat pengaruh Informasi dan komunikasi terhadap keandalan pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
6. Terdapat pengaruh antara pemantauan terhadap keandalan pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
7. **Metodologi Penelitian**

Secara umum, tipe atau desain penelitian merupakan pedoman yang diperlukan untuk mempermudah proses pelaksanaan penelitian. Selain itu, desain penelitian juga memberikan gambaran bagaimana memperoleh informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan peneliti. Metode penelitian menurut Sugiyono (2012:5) “pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis.”

Menurut Sekaran dan Bougie (2010:103) ada empat tujuan penelitian yaitu: “studi eksploratif (exploratory study), studi deskriptif (descriptive study), pengujian hipotesis (hypothesis testing), dan studi kasus (case studi)”. Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis (hypothesis testing), karena bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh variabel independen yaitu sistem pengendalian intern terhadap variabel dependen yaitu keandalan pelaporan keuangan.

Jenis investigasi yang dilakukan adalah studi kausalitas (causal study) yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan situasi yang tidak diatur dan tanpa melakukan intervensi data untuk mempengaruhi hasil, sehingga tingkat intervensi adalah minimal. Adapun unit analisis yang digunakan adalah individual, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Pengelola keuangan lainnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Horizon waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah one shot study, yaitu data hanya sekali dikumpulkan dalam satu periode.

**3.1 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis 3.1.1 Analisis Regresi Berganda**

Regresi Berganda didasarkan pada hubungan fungsional ataupaun kausal dua variabel atau lebih independen dengan satu variabel dependen yang secara sistematis dinyatakan dalam bentuk statistik sebagai berikut:

Y = α+ β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+e

Dimana:

Y = Keandalan Pelaporan Keuangan

α = Konstanta

β= Koefisien regresi

X1 = Lingkungan Pengendalian

X2 = Penilaian Risiko

X3 = Kegiatan Pengendalian

X4 = Informasi dan Komunikasi

X5 = Pemantauan

#### Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005: 84). Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel sistem pengendalian intern secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, yaitu keandalan pelaporan keuangan.

#### Uji Hipotesis secara Parisal (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2005: 84). Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (sistem pengendalian intern) yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap variabel terikat (keandalan pelaporan keuangan) secara terpisah atau parsial.

**3.6.3 Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan perubahan variabel independen yang disebabkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Koefesien determinasi 0 berarti variabel independen lingkungan pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), kegiatan pengendalian (X3), informasi dan komunikasi (X4), dan pemantauan (X5) sama sekali tidak berhubungan atau mempengaruhi variabel dependen keandalan pelaporan keuangan (Y) namun sebaliknya apabila koefisien determinasi mendekati 1 maka itu artinya semakin berhubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam hal ini ada dua analisis koefisien yang dilakukan yaitu :

1. Analisis Koefisien Determinasi Berganda

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara bersama-sama seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat dengan rumus:

R2=b1∑x1y+b2∑x2y+ b3∑x3y +b4∑x4y+b5∑x5y

1. Analisis Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien determinasi parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial dengan rumus sebagai berikut :

KD = Beta x Zero Order x 100%

1. **Hasil dan Pembahasan**
   1. **Hasil Penelitian**
      1. **Analisa Regresi Berganda**

Hasil dari model regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y = --2,386 0,493LP + 0,643PR + 0,537KP + 0,269IK + 0,485PM + 485PM

1. Terdapat pengaruh variabel Lingkungan Pengendalian terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan yang besarnya - 0,493. Sehingga jika Lingkungan Pengendalian meningkat maka Lingkungan Pengendalian tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan sebesar - 0,493.
2. Terdapat pengaruh variabel Penilaian Risiko terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan yang besarnya 0,643. Sehingga semakin tinggi tingkat Penilaian Risiko maka akan memberikan kontribusi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan sebesar 0,643.
3. Terdapat pengaruh variabel Kegiatan Pengendalian terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan yang besarnya 0,537. Sehingga jika Kegiatan Pengendalian meningkat maka Kegiatan Pengendalian tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan tersebut sebesar 0,537.
4. Terdapat pengaruh variabel Informasi dan Komunikasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan yang besarnya 0,269. Sehingga jika Informasi dan Komunikasi meningkat maka Informasi dan Komunikasi tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan tersebut sebesar 0,269.
5. Terdapat pengaruh variabel Pemantauan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan yang besarnya 0,485. Sehingga jika pemantauan meningkat maka pemantauan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan tersebut sebesar 0,485.
   * 1. **Analisis Koefisien Determinasi**



Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan sebesar 0,840 artinya hasil tersebut menandakan bahwa 84% variabel Keandalan Pelaporan Keuangan dapat diterangkan dengan variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Sedangkan sisanya 16% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti.

Adapun koefisien determinasi parsial untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :



* + 1. **Uji Hipotesis secara parsial (Uji F)**



Hasil pengolahan data pada tabel 4.17 diperoleh Fhitung sebesar 70,349 dengan Sig.F 0,000 dimana kriteria penolakan H0 jika Fhitung lebih besar daripada Ftabel, dengan derajat bebas v1 = 6 - 1 dan v2 = 73 – 5 dan tingkat kepercayaan 90%, maka dari tabel distribusi F didapat nilai Ftabel untuk F0,10.2,65 = 2,36. Dikarenakan Fhitung (70,349) lebih besar daripada Ftabel (2,36), maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan.

* + 1. **Uji Hipotesis secara parsial (Uji t)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **t hitung** | **t tabel** | **Sig.** |
| X1 | -5,814 | -1,671 | 0,00 |
| X2 | 2,595 | 1,671 | 0,01 |
| X3 | 6,953 | 1,671 | 0,00 |
| X4 | 1,869 | 1,671 | 0,06 |
| X5 | 4,088 | 1,671 | 0,00 |

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar Menghitung t-tabel dengan ketentuan taraf signifikan 0,10 dan degree of freedom (Df) = n – k. Dengan ketentuan tersebut, diperoleh angka (Df) dari t-tabel diperoleh t-tabel sebesar Df = 73 – (6-1) = 68 dengan 0,10 hasil t-tabel = 1,671. Dikarenakan thitung lebih besar daripada ttabel, maka H0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan.

* 1. **Pembahasan**

Hasil uji koefisien determiniasi diperoleh bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan sebesar 0,840 artinya hasil tersebut menandakan bahwa 84% variabel Keandalan Pelaporan Keuangan dapat diterangkan dengan variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Sedangkan sisanya 16% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa salah satu tujuan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya keandalan pelaporan keuangan.

Hasil uji F atau uji simultan mempergunakan software SPSS 20.0, hasil pengolahan diperoleh Fhitung sebesar 70,349 dengan Sig.F 0,000 lebih besar daripada Ftabel (2,36), maka artinya Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Sistem pengendalian intern di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sudah terlaksana dengan baik sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan menjadi baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2007:7) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Opini Laporan Keuangan pun telah meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan PP No 8 Tahun 2006 bahwa untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam rangka meningkatkan keandalan peleporan keuangan, maka setiap lingkungan pemerintah harus melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah yang didalamya terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

1. **Kesimpulan dan Saran**
   1. **Kesimpulan**

1. Sistem Pengendalian Intern di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung telah terlaksana dengan baik. Sistem Pengendalian Intern terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Lingkungan pengendalian di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya Surat Keputusan dari Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung bagi pengelola keuangan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib. Penilaian risiko di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dan sikap kehati-hatian yang dilakukan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Kegiatan pengendalian di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terlaksananya kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Informasi dan komunikasi di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung telah terlaksana dengan baik, Hal ini dibuktikan oleh digunakannya Aplikasi SAIBA dan aplikasi SIMAK BMN oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaporan keuangan. Pemantauan di di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan oleh adanya perbaikan-perbaikan atau Tindak Lanjut (TL) yang dilakukan berdasarkan usulan Inspektorat Kementerian Pariwisata dan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan setiap periodenya terkait pelaksanaan pelaporan keuangan.

2. Pelaporan Keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dapat diandalkan, hal ini dibuktikan oleh tersajinya laporan keuangan yang disusun berdasarkan hasil rekonsiliasi setiap bulan selama satu tahun serta adanya pendampingan dari Kementerian Keuangan agar laporan keuangan tersaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan secara simultan atau bersama-sama sebesar 84%. Dengan kata lain variabel Keandalan Pelaporan Keuangan dapat diterangkan dengan variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Sedangkan sisanya 16% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti.

* 1. **Saran**

1. Sebaiknya pihak Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung baik karyawan maupun dosen berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal-nya secara menyeluruh.

2. Aturan perilaku harus diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh tingkatan pimpinan maupun pegawai di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung untuk meningkatkan Lingkungan Pengendalian.

3. Risiko pelaksanaan program dan kegiatan perlu di identifikasi pada tiap tingkatan, kemudian pimpinan perlu melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh tentang dampak pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelaporan keuangan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung untuk meningkatkan Penilaian Risiko.

4. Pimpinan perlu mengidentifikasi kegiatan pengendalian terkait pelaksanaan pelaporan keuangan yang diperlukan untuk menangani risiko di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung untuk meningkatkan Kegiatan Pengendalian.

5. Transaksi-transaksi terkait pelaporan keuangan perlu diinformasikan dan dikomunikasikan secara jelas di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung untuk meningkatkan Informasi dan Komunikasi.

6. Tindak Lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan agar dapat diperbaiki dan tidak diulangi kembali di periode-periode berikutnya untuk meningkatkan Pemantauan.

7. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menambah variabel lain agar variabel Keandalan Pelaporan Keuangan lebihbaik lagi di setiap instansi terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta

Agus Harjito, Martono. 2008. Manajemen Keuangan. EKONISIA. Yogyakarta

Arthur J. Keown, David F. Scott, Jr., John D. Martin, J. William Petty (2010). Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan Jilid 1 (Edisi Kesepuluh). PT. Indeks. Jakarta.

Azhar Susanto. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Lingga Jaya. Bandung.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik* : *Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta

Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo, 2007, *Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya.* CV. Andi offset. Yogyakarta.

Boyton, Johnson, Kell. 2001. *Modern Auditing*. Erlangga. Jakarta.

Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission. 2013. *Risk and Statement-Based Internal Auditing*. COSO

George R. Terry, 2011, Prinsip-prinsip Manajemen, PT. Bumi Aksara. Bandung

Gitman, Lawrence J, 2012. Principles Of Managerial Finance. 13th Edition. Edinburgh : Pearson.

Hall, James A. 2007. *Accounting Information System*: Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta

Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta

I Gusti Agung Rai. 2010. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Selemba Empat. Jakarta

I Made Sudana. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan. Erlangga. Jakarta

Indra Bastian. 2011. Audit Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta

Indrawan, Rully & Yaniawati, Raden Poppy. 2014. Metodologi Penelitian. PT Refika Aditama. Bandung

James, A. Hall, 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Ketiga, Terjemahan

Amir Abadi Yusuf, Salemba Empat, Jakarta

Jerry J. Weygandt, et al. 2011. Financial Accounting. Jhon Willey & Sons. New Jersey

Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja. 2008. Riset Bisnis.. C.V Andi Offset. Yogyakarta

Kasmir, 2010, Pengantar Manajemen Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Yogyakarta

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. ANDI. Yogyakarta Martono, dan Harjitno, Agus. 2008. Manajemen Keuangan. Ekonisia. Yogyakarta

Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Salemba Empat, Jakarta.

Mulyadi, 2014. Audit 1, Edisi ke-6. Salemba Empat. Jakarta

Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Kencana. Jakarta

O’Brien, James A. dan Marakas, George M. 2011. *Management Information Systems, 10th Edition*. McGraw-Hill/ Irwin, New York

Purwanto. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif. CV Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Panuju, Redi. 2001. Komunikasi Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Rianse, Usman, & Andi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* : *Teori dan Aplikasi*. CV.Alfabeta. Bandung

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Salemba Empat, Jakarta.

Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2010. Research Method for Business A Skill Building Approach (5th Edition). United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Sekertariat Jendral Kementerian Pertanian. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).* <http://setjen.deptan.go.id/spi/detailartikel.php?id=46>. (10/06/2016)

Stoner, James A.F. 2006. Management. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc

Susanto, Azhar. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Lingga Jaya. Bandung

Sutarman. 2012. Pengantar Teknologi Informasi. Bumi Aksara. Jakarta

Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama. Kencana

Prenada Media Group. Jakarta

Tugiman, Hiro. 2008. Pengenalan Audit Internal. Kanisius. Yogyakarta

Usman, Husaini. 2011. Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan

PT. Bumi Aksara. Jakarta

Van Home, James C & John M. Wachowicz. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Salemba Empat. Jakarta

Welsch, Hilton, Gordon. Terjemahan Purwatiningsih dan Moudy Waarouw (2000). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba.* Salemba Empat. Jakarta

Wareen, et al. (2005). Pengantar Akuntansi, Edisi 21. Salemba Empat. Jakarta

Wibisono. 2010. *Manajemen Kinerja*. Erlangga. Jakarta

Wiwin Yadiati dan Ilham Wahyudi, 2010, Pengantar Akuntansi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal-Jurnal:

Anindita, Primastuti. 2006. Kualitas Sistem Pengendalian Intern Sebagai PenentuTingkat Kepercayaan Laporan Keuangan Suatu Pemerintah Daerah. Widyapraja, Vol. 32, No. 3, Tahun 2006.

Anggraeni, Dian Tri. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya

Darwanis dan Desi Dwi Mulyani. 2009. Pengaruh Kapasistas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Syiah Kuala. Aceh.

Desmiyanti. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Universitas Riau. Riau

Dita Afrianti. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Universitas Diponegoro. Semarang

Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Bandung Business School. Bandung

Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Semarang

Tony, Triyulianto. 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bersama Kita Bisa Menyongsong Masa Depan BPKP yang Lebih Cerah. Bulletin Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Vol. 1, No. 4, 24 Oktober 2008.

Peraturan-Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara